



**PUTUSAN**  
Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRADA BASRAH, S.T. BIN BASRAH**
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 16 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 286 RT 01, Kel.  
Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka  
Prov. Kep. Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FIRADA BASRAH, S.T Bin BASRAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRADA BASRAH, S.T Bin BASRAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S berwarna Ungu dengan Nomor Imei 1 : 86830468145934 dan Imei 2 : 868304068145926;
  - 2) 1 (satu) buah Laptop berwarna abu – abu merk HP beserta cas;
  - 3) 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA nomor 5260 5120 4699 6334;
  - 4) 10 (sepuluh) lembar Screenshot/hasil tangkapan layar yang berisi hasil percakapan;
  - 5) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan hasil timah total tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1.277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima) Kilogram dikali Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan hasil sebesar Rp 118.807.500,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan hasil timah catatan atas nama WADI sebesar 50 Kg (lima puluh Kilogram), FEBI sebesar 121,5 Kg (seratus dua puluh satu koma lima Kilogram), WAHAB sebesar 184 Kg (seratus delapan puluh empat Kilogram), DONI/GODOI sebesar 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram), OPANK sebesar 189 Kg (seratus delapan puluh sembilan Kilogram), AIM sebesar 28 Kg (dua puluh delapan Kilogram), UKENG sebesar 244,5 Kg (dua ratus empat puluh empat koma lima Kilogram), AMBOK sebesar 42 Kg (empat puluh dua Kilogram), CANDRA sebesar 125 Kg (seratus dua puluh koma lima Kilogram), DONI RIAN sebesar 203 Kg (dua ratus tiga Kilogram), FAISAL sebesar 57,5 Kg (lima

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma lima Kilogram) dengan jumlah 1277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima kilogram);

- 7) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan total hasil timah tanggal 22 Maret 2024 Total timah sebesar : 279 Kg (dua ratus tujuh puluh sembilan kilogram) dan tanggal 23 Maret 2024 Total Timah sebesar : 1267 Kg (seribu dua ratus enam puluh tujuh kilogram);
- 8) 1 (satu) lembar kertas Folio yang berisi tulisan tangan catatan pembagian uang Koordinasi, Panitia dan Masjid;
- 9) 1 (satu) lembar kertas hasil rekap penambangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan uang sebesar Rp 129.234.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 10) 3 (tiga) lembar Natulen Rapat Musyawarah Mufakat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 11) 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan total uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- 13) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan pembayaran kepada penambang – penambang atas nama DENI/RIAN, OKENG, HADI KOR, MARTIN BCA, OPAN, FAISAL dan FEBI tanggal 23 Maret 2024;
- 14) 1 (satu) lembar Rincian Pendapatan Bagi Hasil dari tanggal 10 Maret 2024 s/d 16 Maret 2024;
- 15) 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Air Kantung);
- 16) 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Nelayan II (Tanah Hongkong));
- 17) 2 (dua) lembar Surat Proker Kegiatan Ponton Rajuk Tower di Lingkungan Air Kantung Sungailiat (Kolong Buntu) Periode 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 18) 2 (dua) buah buku jilidan tentang Pengurus Panitia Ponton Rajuk Tower wilayah Kolong Buntu Lingkungan Air Kantung Sungailiat – Bangka Prov. Kep. Babel;
- 19) 1 (satu) lembar Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Buntu Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan catatan Daftar Media sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
- 21) 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang Koordinasi, persenan dan penghirungan jumlah uang;
- 22) 10 (sepuluh) buah buku Nota Kontan Pembayaran yang berisi pembayaran pasir timah kepada penambang – penambang;
- 23) 1 (satu) buah buku Kasbon (Bon Pinjem Dana);
- 24) 1 (satu) lembar Rincian Biaya keluar dan Kasbon sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp 12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 25) 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Pembayaran yang terdiri dari :
  - 4 (empat) lembar Nota pembayaran atas nama FEBI;
  - 5 (lima) lembar Nota pembayaran atas nama UKENG;
  - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama WAHAB;
  - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama AMBO;
  - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama WADI;
  - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama OPAN;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DODI;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ALOY;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ANAN;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DONI Als GODOI;
- 26) 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan potongan tanggal 23 Maret 2024 dan 24 Maret 2024;
- 27) 5 (lima) lembar Nota pembelian perakitan Ponton atas nama Mesjid sebesar Rp 10.263.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 28) 2 (dua) lembar Nota pembayaran Jasa sewa PC MINI;
- 29) 1 (satu) lembar Nota pengeluaran atas nama AGUS untuk buat tenda;
- 30) 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan rincian dari sisa hasil usaha untuk panitia;
- 31) 5 (lima) lembar bukti transfer terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JULIANA DINCE sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama ARI FARIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama FEBBY FEGUSTA SE sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JUHAIMA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama NILAM SELVIRA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
- 32) 28 (dua puluh delapan) lembar bukti pembayaran biaya administrasi terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YUK EKA yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama AMBO yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama WAHAB yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ALFATIH HANIF yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama RANGER yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya Sewa PC/Exavator BUAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama TAMAN yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 17 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YAYAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama BODOY

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama HAMZAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama H. IWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama MARSE yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama OPAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;

33) 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya wartawan dan biaya pencabutan Berita RT 02 kepada Wartawan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;

34) 8 (delapan) lembar bukti pembayaran administrasi Gelombang kedua terdiri dari:

- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama EDY IRAWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBI AGUSTA yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Kolong Buntu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FIRMAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

35) 2 (dua) lembar bukti pembayaran Take over Gelombang Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ARI AFRIANSYAH/AYI yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

36) 15 (lima belas) rangkap bukti pembayaran kosong yang disiapkan untuk pembayaran Pemilik Ponton;

37) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman proses jual beli timah hasil penambangan tersebut.

Dikembalikan Ke Penuntut Umum Untuk Digunakan Ke Perkara Lain Atas Nama Agus Riyadi Bin Gunawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena niat Terdakwa hanya membantu masyarakat mendapatkan kompensasi, Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM : 697/S.Liat/06/2024/Dit Polairud tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Firada Basrah, S.T bin Basrah bersama-sama dengan Saksi Agus Riyadi bin Gunawan (penuntutan terpisah), pada tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 07 April 2024, atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu antara bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan April 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sungai Kolong Buntu Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan penambangan tanpa izin, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

----- Bahwa berawal pada tanggal 05 Februari 2024, Saksi Agus Riyadi bin Gunawan (penuntutan terpisah) memiliki ide untuk menambang pasir timah di kolong buntu Nangnung Kelurahan Sungailiat, agar kegiatan penambangan tersebut tidak terjadi gejala ditengah warga komplek Nangnung, Saksi Agus Riyadi mengajak Saksi Sumitro bin Subali Bejo untuk bertemu H. Adenan selaku ketua Yayasan At Taqwa dan merupakan orang yang dituakan di komplek Nangnung, dan dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Riyadi menyampaikan kepada H Adenan maksud Saksi tersebut akan menyumbangkan hasil penambangan pasir timah untuk Masjid, dan keinginan Saksi Agus Riyadi tersebut disetujui oleh H. Adenan, selanjutnya Saksi Agus Riyadi menyusun struktur panitia ponton rajuk dengan menggunakan logo Kantor Hukum Bujang Musa S.H., M.H dan setelah konsep struktur panitia ponton rajuk selesai, terbentuklah susunan kepanitiaan yaitu Penasihat Hukum sdr. Bujang Musa, S.H., M.H dan Jemi Mazka Ulfa, S.H, Pembina Kepengurusan yaitu H. Addenan, Umar Syahrial, Artam, Edison, Dani, Yahya Bachrin, Pengurus yaitu Sumitro selaku ketua, Yancui selaku wakil ketua, Agus Riyadi selaku sekretaris, Hari Purnomo selaku bendahara, bidang Divisi Produksi yang terdiri dari Divisi Pengambilan Timah tiap ponton yaitu Yudi als Black selaku ketua, Yus selaku anggota, Eja selaku anggota, Trek selaku anggota, Bram selaku Anggota, Toni als Butun selaku anggota dan Fajrin selaku Anggota, sedangkan untuk divisi Keamanan yaitu Santo selaku ketua, Akbar selaku Anggota, dan Rijun selaku anggota. Saat kegiatan penambangan pasir timah berlangsung, Saksi Agus Riyadi selalu ditanya oleh media terkait kegiatan penambangan tersebut, untuk mengatasi pertanyaan media tersebut, selanjutnya Saksi Agus Riyadi mengajak Terdakwa Firada Basrah, S.T bin Basrah untuk menjadi koordinator media agar kegiatan penambangan di kolong buntu Nangnung tersebut tidak diberitakan selain itu Terdakwa juga melakukan monitor dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil berupa pasir timah untuk kompensasi Masjid dan warga. Selanjutnya pada waktu dan tempat yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada beberapa media salahsatunya kepada Hardi Mardeni bin Umar Yusuf seorang wartawan Media Kejar Berita News.

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa memantau hasil penambangan pasir timah yang telah terkumpul kurang lebih 1.156 kilogram yang dibeli oleh Weri, dan dari total tersebut hasil yang diperoleh setelah dibayar sejumlah

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Weri (belum tertangkap) selaku pembeli pasir timah untuk membayar pasir timah tersebut ke penambang, selanjutnya uang sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan puluh juta) tersebut ditransfer ke rekening Risman (belum tertangkap) yang merupakan rekan Saksi Agus Riyadi karena Weri tidak memiliki uang cash, selanjutnya dari jumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan puluh juta) tersebut telah dibayar kepada para penambang, sedangkan Terdakwa meminta kepada Risman untuk fee masjid sejumlah Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Risman, selain itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp12.999.999.00 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) sebagai biaya koordinasi dari sisa pembayaran hasil penambang, selanjutnya uang tersebut diminta Terdakwa untuk disimpan Terdakwa.

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Andi Kustiawan untuk warga Nangnung, sedangkan

uang sejumlah Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) ditransfer Terdakwa kepada Suhardan untuk membayar sewa mobil yang dipakai Saksi Agus Riyadi bin Gunawan, sedangkan sisa sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) di bayar Terdakwa untuk membayar bon warung panitia penambangan.

Bahwa. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa memantau kegiatan penimbangan hasil penambangan dan menghasilkan pasir timah sebanyak 1.209 kilogram yang dibeli oleh Ardi (belum tertangkap) dengan hasil sejumlah Rp123.318.000.00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan uang hasil penambangan tersebut dibayar kepada Saksi Agus Riyadi bin Gunawan.

----- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Agus Riyadi bin Gunawan, tidak memiliki izin baik IUP, IUPK, IPR, dalam melakukan kegiatan penambangan di kolong buntu Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa Firada Basrah, S.T bin Basrah pada tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 07 April 2024, atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu antara bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sungai Kolong Buntu Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

----- Bahwa berawal pada tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa meminta uang kompensasi penambangan tanpa izin di klong buntu Nangnung kepada Weri (belum tertangkap) yang merupakan pembeli pasir timah tanpa izin tersebut, uang kompensasi yang diminta Terdakwa tersebut sebesar 10% untuk masjid, 10 % untuk uang keamanan, kompensasi warga Nangnung sebesar 5%. Pada waktu tersebut hasil pembelian timah sejumlah Rp118.000.000.00 (seratus delapan belas juta) rupiah, pada saat itu Weri tidak mempunyai uang tunai, sehingga ditransfer ke rekening Risman, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ari Fahrianyah, setelah dipotong dari penambang oleh Saksi Ari Fahriansyah, selanjutnya uang sejumlah Rp10.750.000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar kepada Weri dan Hadi sebagai uang keamanan, dan sejumlah Rp12.999.999.00 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ditransfer sdr. Risman ke rekening Terdakwa. Selanjutnya tanggal 26 Maret 2024 uang sejumlah Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Andi Kustiawan als Akew bin Yakub dengan alasan untuk kepentingan warga Nangnung. Selanjutnya sisa sejumlah Rp1.900.000.00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) Terdakwa bayar untuk rental mobil yang dipergunakan Saksi Agus Riyadi dan sisa sejumlah Rp900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar untuk bon makan warung panitia penambangan.

Bahwa dalam rentang waktu dari 11 Maret 2024 sampai dengan 07 April 2024, Terdakwa selalu meminta fee kepada pembeli dengan alasan untuk masjid, uang pengamanan serta untuk masyarakat Nangnung, dan Terdakwa mengetahui bahwa penambangan di klong buntu Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat tersebut tidak memiliki izin baik IUP, IUPK, IPR.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDE ARDHIKA, S.H.dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekira jam 00.10 wib telah menangkap Terdakwa, saksi Febby dan saksi Sumitro di Mako Dit.Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung yang diduga sebagai Panitia / Koordinator penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Febby berperan dalam hal menentukan titik lokasi penambangan, mengatur posisi-posisi ponton yang melakukan penambangan, melakukan pencatatan penimbangan pasir timah yang disetor penambang kepada panitia yang kemudian Terdakwa laporkan ke saksi Agus atau sdr. Hadi, dan menulis nota pembayaran hasil timah yang akan dibayarkan kepada penambang kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Hadi dan saksi Agus serta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Martin sebagai pemilik ponton;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa berperan menerima uang transfer dari Sdr. Risman yang merupakan rekan saksi Agus sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024 yang merupakan uang hasil penjualan pasir timah dari para penambang yang dibeli oleh sdr. Weri, lalu Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada sdr. Andi Kustiawan untuk didistribusikan kepada warga Desa Nangnung sebagai uang kompensasi warga, mengelola dan mengatur uang dari hasil penjualan pasir timah dan membayar uang koordinasi kepada Media untuk meredam pemberitaan penambangan timah tersebut, namun Terdakwa mengaku tidak mendapatkan keuntungan dari penambangan timah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sumitro berperan bersama saksi Agus membuat struktur kepanitiaan, menerima pendaftaran para penambang sebagai Ketua Panitia kemudian saksi Sumitro menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jatah Panitia, uang cantingan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang cantingan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pinjaman uang kas panitia dari saksi Agus sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa syarat penambang bisa menambang adalah pemilik ponton mengatasnamakan warga Nangnung, membayar uang pendaftaran sejumlah Rp3.000.000,00 dan adanya potongan 10% (sepuluh) persen untuk koordinasi, 10% (sepuluh persen) untuk Masjid, 5% (lima persen) untuk Panitia dan 5% (lima persen) untuk kompensasi masyarakat;
- Bahwa tidak ada izin penambangan yang dilakukan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. FAJRAN HAKIM ANUGERAH, S. H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekira jam 00.10 wib telah menangkap Terdakwa, saksi Febby dan saksi Sumitro di Mako Dit.Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung yang diduga sebagai Panitia / Koordinator penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Febby berperan dalam hal menentukan titik lokasi penambangan, mengatur posisi-posisi ponton yang melakukan penambangan, melakukan pencatatan penimbangan pasir timah yang disetor penambang kepada panitia yang kemudian Terdakwa laporkan ke saksi Agus atau sdr. Hadi, dan menulis nota pembayaran hasil timah yang akan dibayarkan kepada penambang kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Hadi dan saksi Agus serta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Martin sebagai pemilik ponton;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa berperan menerima uang transfer dari Sdr. Risman yang merupakan rekan saksi Agus sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024 yang merupakan uang hasil penjualan pasir timah dari para penambang yang dibeli oleh sdr. Weri, lalu Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada sdr. Andi Kustiawan untuk didistribusikan kepada warga Desa Nangnung sebagai uang kompensasi warga, mengelola dan mengatur uang dari hasil penjualan pasir timah dan membayar uang koordinasi kepada Media

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meredam pemberitaan penambangan timah tersebut, namun Terdakwa mengaku tidak mendapatkan keuntungan dari penambangan timah tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Sumitro berperan bersama saksi Agus membuat struktur kepanitiaan, menerima pendaftaran para penambang sebagai Ketua Panitia kemudian saksi Sumitro menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jatah Panitia, uang cantingan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang cantingan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pinjaman uang kas panitia dari saksi Agus sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa syarat penambang bisa menambang adalah pemilik ponton mengatasnamakan warga Nangnung, membayar uang pendaftaran sejumlah Rp3.000.000,00 dan adanya potongan 10% (sepuluh) persen untuk koordinasi, 10% (sepuluh persen) untuk Masjid, 5% (lima persen) untuk Panitia dan 5% (lima persen) untuk kompensasi masyarakat;
- Bahwa tidak ada izin penambangan yang dilakukan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. NAKMAL als KAMAL bin BURNI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
- Bahwa bermula sekira pertengahan bulan Maret 2024 saksi dan saksi M. Sofian didatangi oleh IRPAN (DPO) pemilik ponton yang menawarkan untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dengan upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan, kemudian saksi dan saksi M. Sofian menyetujui dan mulai bekerja merakit ponton, namun dikarenakan adanya demo dari masyarakat Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka yang merasa terganggu terhadap kegiatan penambangan ilegal tersebut, maka IRPAN menyuruh saksi dan saksi M. Sofian untuk menunda kegiatan penambangan sampai keadaan kondusif.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penambangan pasir timah yang saksi lakukan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dikoordinir oleh Kepanitiaan saksi AGUS RIYADI Bin GUNAWAN dkk;

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRPAN diharuskan membayar uang masuk sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana Sdr. Irpan sempat memberitahu saksi bahwa Sdr. Irpan sudah membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Agus Riyadi Bin Gunawan selaku Panitia dan setiap hasil penambangan dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Panitia yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, atas perintah IRPAN, saksi dan saksi M. Sofian memulai kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit Ponton Apung, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang  $\pm 3$  (tiga) meter dan 5 (lima) lembar Karpet, kemudian saksi dan saksi M. Sofian mempersiapkan alat-alat kemudian sekira pukul 07.30 wib, saksi MUHAMMAD SOFIAN bersama dengan LOIS (DPO) dan JUNIOR (DPO) bersama-sama menghidupkan mesin air, setelah mesin air hidup, saksi MUHAMMAD SOFIAN bersama dengan LOIS dan JUNIOR secara bersama-sama menghidupkan juga mesin Gearbox dan setelah mesin Gearbox hidup dilanjutkan menghidupkan mesin tanah dan setelah mesin tanah hidup, pasir timah terhisap dari dasar melalui pipa rajuk, yang kemudian turun di sakkan yang berada di darat dan saksi bertugas mengontrol pasir timah yang dihasilkan yang berada di sakkan dan setelah  $\pm 2$  (dua) jam bekerja datang pihak Kepolisian mengamankan saksi dan saksi M. Sofian, pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi dan saksi M. Sofian sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 5$  (lima) kilogram dalam keadaan belum dicuci bersih yang rencananya akan diserahkan kepada pemilik ponton yaitu sdr IRPAN;
- Bahwa tidak ada izin saksi melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. MUHAMMAD SOFIAN bin SIMANJUNTAK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat  $01^{\circ} 51' 249'' \text{ S} - 106^{\circ} 7' 501'' \text{ E}$ ;
- Bahwa bermula sekira pertengahan bulan Maret 2024 saksi dan saksi Nakmal didatangi oleh IRPAN (DPO) pemilik ponton yang menawarkan untuk bekerja

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



melakukan kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dengan upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan, kemudian saksi dan saksi Nakmal menyetujui dan mulai bekerja merakit ponton, namun dikarenakan adanya demo dari masyarakat Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka yang merasa terganggu terhadap kegiatan penambangan ilegal tersebut, maka IRPAN menyuruh saksi dan saksi Nakmal untuk menunda kegiatan penambangan sampai keadaan kondusif;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepanitiaan kegiatan penambangan pasir timah yang saksi lakukan di Lokasi tersebut karena yang berhubungan dengan Panitia adalah sdr. Irpan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, atas perintah IRPAN, saksi dan saksi Nakmal memulai kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit Ponton Apung, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang  $\pm 3$  (tiga) meter dan 5 (lima) lembar Karpet, kemudian saksi Nakmal dan saksi mempersiapkan alat-alat kemudian sekira pukul 07.30 wib, saksi bersama dengan LOIS (DPO) dan JUNIOR (DPO) bersama-sama menghidupkan mesin air, setelah mesin air hidup, saksi bersama dengan LOIS dan JUNIOR secara bersama-sama menghidupkan juga mesin Gearbox dan setelah mesin Gearbox hidup dilanjutkan menghidupkan mesin tanah dan setelah mesin tanah hidup, pasir timah terhisap dari dasar melalui pipa rajuk, yang kemudian turun di sakkan yang berada di darat dan saksi Nakmal bertugas mengontrol pasir timah yang dihasilkan yang berada di sakkan dan setelah  $\pm 2$  (dua) jam bekerja datang pihak Kepolisian mengamankan saksi dan saksi Nakmal, pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi dan saksi Nakmal sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 5$  (lima) kilogram dalam keadaan belum dicuci bersih yang rencananya akan diserahkan kepada pemilik ponton yaitu sdr IRPAN;
- Bahwa tidak ada izin saksi melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. SUTRIMO Als TRIMO bin AWALUDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi ditangkap pada saat melakukan penambangan bersama saksi Sudarmin, Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan barang bukti yang didapatkan berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total + 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dimana sebelumnya telah dijanjikan oleh sdr. Faisal bahwa saksi dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu saksi, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan saksi Sudarmin dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi Sudarmin merupakan Pekerja Harian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan saksi Sudarmin berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang, setelah itu mereka pun langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir, 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang  $\pm 5$  (lima) meter, Karpet  $\pm 5$  (lima) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah dan 3 (tiga) buah pipa besi rajuk yang merupakan milik Sdr. FAISAL;
- Bahwa proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama saksi menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu saksi menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rujuk tersebut, selanjutnya saksi memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudian Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci kembali sampai mendapat hasil pasir timah;

- Bahwa saksi bersama saksi Sudarmin, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA melakukan kegiatan Penambangan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja Kembali;
- Bahwa seluruh pasir timah yang didapat semuanya dibawa oleh sdr. Faisal ke Panitia Penimbangan pada lokasi tersebut;
- Bahwa syarat untuk dapat menambang di lokasi tersebut adalah dari hasil pasir timah akan dipotong 30 % (tiga puluh persen), yaitu 20 % (dua puluh persen) untuk warga Nangnung dan 10% (sepuluh persen) untuk Masjid, dan pasir timah dibeli oleh Panitia yaitu saksi Agus seharga Rp90.000,00 - Rp95.000,00 per kilogramnya;
- Bahwa saksi mengenal saksi Agus dan sdr. Rais sebagai Panitia;
- Bahwa sebelumnya Pasir timah yang sudah didapatkan sebanyak  $\pm$  160 (seratus enam puluh) kilogram dan keuntungan yang didapatkan selama saksi sekitar  $\pm$  Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Sudarmin sekitar  $\pm$  Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAISAL;
- Bahwa tidak ada izin saksi bersama saksi Sudarmin, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. SUDARMIN Als ANDI bin SAIRIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi ditangkap pada saat melakukan penambangan bersama saksi Sutrimo, Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total + 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dimana sebelumnya telah dijanjikan oleh sdr. Faisal bahwa saksi Sutrimo dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu saksi Sutrimo, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan saksi dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi merupakan Pekerja Harian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan saksi Sutrimo berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang, setelah itu mereka pun langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir , 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang  $\pm 5$  (lima) meter, Karpas  $\pm 5$  (lima ) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah dan 3 ( tiga) buah pipa besi rajuk yang merupakan milik Sdr. FAISAL;
- Bahwa proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama saksi Sutrimo menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu saksi Sutrimo menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rajuk tersebut, selanjutnya saksi Sutrimo memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudian Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci Kembali sampai mendapat hasil pasir timah;

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan saksi Sutrimo melakukan kegiatan Penambangan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja Kembali;
- Bahwa seluruh pasir timah yang didapat semuanya dibawa oleh sdr. Faisal ke Panitia Penimbangan pada lokasi tersebut dan pasir timah dibeli oleh Panitia yaitu saksi Agus seharga Rp90.000,00 - Rp95.000,00 per kilogramnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak potongan pasir timah yang ditetapkan oleh Panitia kepada penambang;
- Bahwa saksi mengenal saksi Agus dan sdr. Gun sebagai Panitia;
- Bahwa saksi sudah menerima upah sekitar  $\pm$  Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAISAL;
- Bahwa tidak ada izin saksi bersama saksi Sutrimo, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. AGUS RIYADI bin GUNAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 5 Februari 2024 saksi memiliki ide mengelola penambangan pasir timah di lokasi Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berencana untuk menggandeng kelompok Pemuda Desa Nangnung, lalu saksi mengajak saksi Sumitro untuk mendatangi saksi H. Adenan selaku Ketua Yayasan At-Taqwa dengan menyampaikan bahwa sebagian hasil penambangan akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid sehingga saksi H. Adenan tidak keberatan jika Masjid dilibatkan;
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan kepada tokoh Pemuda Nangnung tentang pengelolaan penambangan kemudian menyusun struktur Panitia Ponton Rajuk dengan menggunakan logo Kantor Penasehat Hukum milik saksi Bujang Musa, sebagai berikut :
  - Penasehat Hukum :
    1. Bujang Musa, S.H., M.H.
    2. Jemi Mazka Ulfa, S.H.

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembina Kepengurusan :

1. H. Adenan
2. Umar Syahril
3. Artam
4. Edison
5. Dani
6. Yahya Bachrin

- Pengurus :

1. Sumitro selaku Ketua
2. Yancui selaku Wakil Ketua
3. Agus Riyadhi selaku Sekretaris
4. Hari Purnomo selaku Bendahara

- Divisi Produksi :

1. Divisi Pengambilan Timah tiap Ponton :

- Yudi als Black selaku Ketua
- Yus selaku Anggota
- Eja selaku Anggota
- Trek selaku Anggota
- Bram selaku Anggota
- Tony als Butun selaku Anggota
- Pajrin selaku Anggota

2. Divisi Keamanan

- Santo selaku Ketua
- Akbar selaku Anggota
- Rijun selaku Anggota

- Bahwa saksi Sumitro dijadikan sebagai Ketua karena tidak ada yang mau menjadi Ketua dalam Kepanitiaan sehingga rekan-rekan Panitia yang lain menunjuk saksi Sumitro menjadi Ketua Panitia;
- Bahwa tugas saksi Sumitro dalam Kepanitiaan adalah menerima penambang yang ingin bekerja di lokasi tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengawasi/melakukan kontrol terhadap kegiatan penambangan;
- Bahwa cara saksi Sumitro melakukan pengawasan adalah datang dan melihat para penambang yang sedang bekerja di lokasi sembari melihat jumlah Ponton yang bekerja pada hari tersebut;

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menawarkan saksi Febby untuk ikut dalam Kepaniteraan yang mengkoordinir kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena saksi Febby mempunyai kemampuan untuk menentukan titik lokasi penambangan;
- Bahwa saksi Febby dalam adalah sebagai Sekretaris yang bertugas mendata/mencatat/menimbang hasil dari penambang, membayar uang ke penambang dan menentukan titik lokasi penambangan;
- Bahwa saksi Febby mendapat keuntungan dari perannya namun saksi tidak mengetahui karena pembayarannya selalu diberikan kepada Sdr. Hadi;
- Bahwa sekira tanggal 20 Februari 2024 Panitia dan calon penambang mengadakan rapat di rumah saksi dan didapat hasil bahwa hasil timah akan dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dan uang pendaftaran Ponton sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 7 Maret 2024 Panitia dan calon penambang mengadakan rapat sekaligus membuka pendaftaran dan ada 7 (tujuh) orang penambang yang mendaftar dimana 2 (dua) orang membayar uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu penambang mulai bekerja tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa uang pendaftaran diterima oleh saksi dan digunakan untuk operasional Panitia seperti membeli BBM, rokok dan makan Panitia;
- Bahwa saksi selalu dimintai keterangan oleh pihak media mengenai penambangan ini lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan mengatasi pihak media dan akhirnya Terdakwa ingin membantu meredam pihak media sehingga kegiatan penambangan berjalan dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari Sdr. Hadi sehingga Sdr. Hadi juga mengajak Terdakwa untuk gabung menjadi Panitia;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Wakil Ketua yang bertugas mengontrol uang cantingan dan koordinasi media;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan Terdakwa, namun saksi mengetahui Terdakwa menerima transferan uang sejumlah Rp12.999.999,00 dari Sdr. Risman als Rais dan saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk meredam wartawan memberitakan penambangan ini adalah sdr. Hadi;
- Bahwa tidak ada izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. SUMITRO bin SUBALI BEJO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 5 Februari 2024 saksi Agus Riyadi memiliki ide mengelola penambangan pasir timah di lokasi Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berencana untuk menggandeng kelompok Pemuda Desa Nangnung, lalu saksi Agus Riyadi mengajak saksi untuk mendatangi sdr. H. Adenan selaku Ketua Yayasan At-Taqwa dengan menyampaikan bahwa sebagian hasil penambangan akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid sehingga sdr. H. Adenan tidak keberatan jika Masjid dilibatkan;
- Bahwa saksi Agus kemudian menjelaskan kepada tokoh Pemuda Nangnung tentang pengelolaan penambangan kemudian menyusun struktur Panitia Ponton Rajuk dengan menggunakan logo Kantor Penasehat Hukum milik sdr. Bujang Musa, sebagai berikut :
  - Penasehat Hukum :
    1. Bujang Musa, S.H., M.H.
    2. Jemi Mazka Ulfa, S.H.
  - Pembina Kepengurusan :
    1. H. Adenan
    2. Umar Syahrial
    3. Artam
    4. Edison
    5. Dani
    6. Yahya Bachrin
  - Pengurus :
    1. Sumitro selaku Ketua
    2. Yancui selaku Wakil Ketua
    3. Agus Riyadhi selaku Sekretaris
    4. Hari Purnomo selaku Bendahara
  - Divisi Produksi :
    1. Divisi Pengambilan Timah tiap Ponton :
      - Yudi als Black selaku Ketua
      - Yus selaku Anggota
      - Eja selaku Anggota
      - Trek selaku Anggota

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bram selaku Anggota
- Tony als Butun selaku Anggota
- Pajrin selaku Anggota

## 2. Divisi Keamanan

- Santo selaku Ketua
- Akbar selaku Anggota
- Rijun selaku Anggota
- Bahwa saksi dijadikan sebagai Ketua karena tidak ada yang mau menjadi Ketua dalam Kepanitiaan sehingga rekan-rekan Panitia yang lain menunjuk saksi menjadi Ketua Panitia;
- Bahwa tugas saksi dalam Kepanitiaan adalah menerima penambang yang ingin bekerja di lokasi tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengawasi/melakukan kontrol terhadap kegiatan penambangan;
- Bahwa peran saksi Febby adalah mencatat nota pembelian pasir timah dan membayar pasir timah yang dijual para penambang dan juga memplot/menentukan titik lokasi untuk dilakukan penambangan di lokasi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Febby tersebut merupakan uang yang diberikan oleh sdr. Hadi selaku pembeli pasir timah;
- Bahwa harga timah yang dibeli sdr. Hadi dari penambang adalah seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 20 Februari 2024 Panitia dan calon penambang mengadakan rapat di rumah saksi Agus dan didapat hasil bahwa hasil timah akan dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dan uang pendaftaran Ponton sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 7 Maret Panitia dan calon penambang mengadakan rapat sekaligus membuka pendaftaran dan ada 7 (tujuh) orang penambang yang mendaftar dimana 2 (dua) orang membayar uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu penambang mulai bekerja tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa uang pendaftaran diterima oleh saksi Agus dan digunakan untuk operasional Panitia seperti membeli BBM, rokok dan makan Panitia;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 ada 1 (satu) unit ponton yang bekerja milik sdr. Doni;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 ada 2 (dua) unit ponton yang bekerja, yaitu milik sdr. Doni dan sdr. Wadi;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 ada 3 (tiga) unit ponton yang bekerja, yaitu milik sdr. Doni, sdr. Wadi dan sdr. Wahab;

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16-17 Maret 2024 ada 4 (empat) unit ponton yang bekerja, yaitu milik sdr. Doni, sdr. Wadi, sdr. Wahab dan sdr. Dedek;
- Bahwa cara saksi melakukan pengawasan adalah datang dan melihat para penambang yang sedang bekerja di lokasi sembari melihat jumlah Ponton yang bekerja pada hari tersebut;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Ketua Panitia pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib dan saksi tidak mengetahui lagi siapa saja yang melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan berjalan sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 dan berhenti karena ada keributan antar penambang serta demo penolakan dari masyarakat setempat;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebagai Panitia adalah pada tanggal 16 Maret 2024 menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang cantingan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2024 saksi menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang cantingan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 saksi pernah meminjam uang dari saksi Agus sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait potongan 5 % (lima persen) untuk Panitia saksi dan saksi Febby termasuk yang mendapatkan bagian tersebut berupa uang dimana 5 % (lima persen) tersebut merupakan pasir timah yang didapat dari penambang kemudian dijual dan hasilnya dibagikan kepada Panitia;
- Bahwa tidak ada izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

9. ANDI KUSTIAWAN als AKEW bin YAKUB dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tanggal 7 Maret 2024, namun sempat terhenti karena adanya penolakan dari warga Desa Nangnung pada tanggal 28 Maret 2024 kemudian penambangan kembali dilakukan pada tanggal 6 April 2024;

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada Panitia yang mengkoordinir kegiatan penambangan tersebut namun saksi tidak mengetahui pembentukannya;
- Bahwa saksi selaku pemilik ponton pernah mendaftar untuk ikut dalam penambangan tersebut namun ponton saksi yang dirakit belum selesai sehingga saksi belum bisa melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi juga belum membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditentukan oleh saksi Agus sebagai Panitia;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 saksi hadir dalam rapat klarifikasi di Masjid At Taqwa yang juga dihadiri Terdakwa, saksi Agus, sdr. Yudi dan sdr. Hadi sebagai Panitia serta perwakilan penambang serta pihak Masjid;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi Agus mengklarifikasi tentang uang yang didapat dari hasil penambangan serta menentukan potongan 10% (sepuluh persen untuk koordinasi, 10% (sepuluh persen) untuk Masjid At-Taqwa, Masjid Baiturrahim dan Masjid Tanah Hongkong, 5% (lima persen) untuk Panitia dan 5% (lima persen) untuk kompensasi masyarakat;
- Bahwa saksi sebagai warga Desa Nangnung pernah 2 (dua) kali menerima kompensasi yang didapat dari kegiatan penambangan tersebut yaitu tanggal 26 Maret 2024 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa dan Panitia di rumah saksi, kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan Panitia di rumah sdr. Martoni;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 saksi menyerahkan uang tersebut yang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada sdr. Yudi di rumah sdr. Yudi;
- Bahwa saksi menerima uang kompensasi tersebut karena saksi dinilai amanah dan saksi juga merupakan mantan Ketua RT 02 Nangnung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi uang kompensasi tersebut rencananya akan dibelikan bentuk sembako yang dibagikan kepada warga Desa Nangnung;
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk diberikan kepada Pengurus Masjid At-Taqwa lalu saksi memberikan uang tersebut kepada sdr. Artam yang mewakili Yayasan At-Taqwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. FEBBY FEGUSTA, S. E. bin SAYDAM KM SIDIK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa lokasi penambangan terletak di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Bahwa saksi diajak oleh saksi Agus sejak tanggal 9 Maret 2024 karena Susunan Pengurus dibuat tanggal 24 Februari 2024 maka nama saksi tidak tercantum dalam kepanitiaan namun pada tanggal 15 Maret 2024 saksi ditunjuk sebagai Sekretaris;
  - Bahwa peran saksi sebagai Sekretaris dalam Kepanitiaan adalah menentukan titik lokasi penambangan, mengatur posisi-posisi Ponton yang melakukan penambangan, selaku orang yang melakukan pencatatan penimbangan pasir timah yang disetorkan para penambang ke panitia yang kemudian nota catatan tersebut saksi berikan ke saksi Agus dan menulis nota pembayaran hasil timah yang akan dibayarkan kepada penambang;
  - Bahwa dalam menentukan titik lokasi penambangan saksi menganalisa karena lokasi tersebut merupakan bekas makam kapal keruk tahun 1961 kemudian saksi meletakkan pelampung guna mengatur posisi Ponton untuk bekerja kemudian saksi memberitahu kepada para penambang;
  - Bahwa syarat agar penambang bisa menambang di lokasi tersebut adalah pemilik ponton yang ikut mengatasmakan warga Nangnung, uang administrasi pendaftaran dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Agus;
  - Bahwa hasil dari pasir timah dipotong untuk Masjid sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan oleh sdr. Hadi kepada saksi Agus namun setelah ada konflik kemudian sdr. Hadi memberikan langsung kepada Masjid yaitu kepada sdr. H. Adenan, koordinasi sebesar 10% (sepuluh persen) dipegang oleh sdr. Hadi, Panitia sebesar 5% (lima persen) diberikan oleh sdr. Hadi kepada Panitia, kompensasi masyarakat sebesar 5% (lima persen) diberikan oleh sdr. Hadi kepada saksi Andi yang merupakan warga Nangnung untuk dibelikan sembako dan dibagikan kepada masyarakat;
  - Bahwa kegiatan penambangan yang dikoordinir Panitia berjalan sejak tanggal 11-19 Maret 2024, sempat berhenti dan mulai lagi sejak tanggal 22-25 Maret 2024 dan berhenti lagi pada tanggal 26 Maret 2024 karena ada himbauan dari Polres Bangka, lalu pada tanggal 28 Maret 2024 ada aksi penolakan dari warga namun kembali bekerja pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 terdapat 5 (lima) unit Ponton yang beroperasi;
- Bahwa saksi mencatat total hasil pasir timah yang didapat adalah sekitar 8.863,5 (delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima) kilogram;
- Bahwa saksi mengundurkan diri pada tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Agus dan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Hadi;
- Bahwa saksi pernah dipakai namanya oleh sdr. Martin yang masuk sebagai penambang karena persyaratan harus mengatasnamakan warga Nangnung, dan saksi menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijanjikan uang per minggu oleh sdr. Martin;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

11. HARDI MARDENI bin UMAR YUSUF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2024 ada kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat saksi melakukan liputan untuk Media dimana Anggota Polres Bangka saat itu melakukan himbauan larangan melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Agus dan sdr. Hadi yang menjadi koordinator / pengurus kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan dijual kepada sdr. Hadi dan sdr. Weri;
- Bahwa saksi pernah memanggil saksi Agus ke kantor saksi di Media Kejara Berita News yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi menyerahkan uang kepada saksi Agus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh sdr. Kharisma, sdr. Win, sdr. Agus, sdr. Muksin dan sdr. Rendi dimana sdr. Suraji saat itu tidak berada di kantor saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dituduh sebagai pembeli pasir timah lalu sdr. Rendi yang sebelumnya sudah mengambil uang dari sdr. Suraji datang ke kantor saksi dan mengatakan disuruh sdr. Suraji untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi untuk diserahkan kepada saksi Agus;

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil pembelian pasir timah yang didapat dari lokasi penambangan tersebut yang dibeli oleh sdr. Suraji dan saksi menjadi perantaranya;
- Bahwa saksi membuat video saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan "tolong ya, Saya tidak mau keluar dari sini bermasalah" dimana maksud saksi mengatakan hal tersebut adalah berdasar informasi saksi Agus sering bermasalah dan sering memakan uang hasil penambangan dan saksi tidak mau nanti saksi sampai didemo/dituduh belum menyerahkan uang pembelian pasir timah kepada saksi Agus;
- Bahwa saksi Agus mengatakan "harganya adalah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)" yang maksudnya adalah kesepakatan harga timah per kilogramnya dan harga tersebut ditentukan oleh saksi Agus;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam Nopol B-1503-WCR;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli pasir timah tersebut illegal karena pasir timah tersebut didapat dari lokasi yang tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang koordinasi dari Terdakwa, namun di catatan Terdakwa ada nama 2 (dua) orang anak buah saksi yaitu Sulistyo dan Agus menerima uang dari Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Sulistyo dan Agus mereka menerima uang secara pribadi dan tidak membawa nama Media Kejar Berita News;
- Bahwa Kejar Berita News pimpinan saksi tidak pernah memuat berita tentang adanya aktifitas penambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. EVAACHJANI ZULFA, S.H., M. H. dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa konsep "Penyertaan" dalam KUHP terdapat di Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikatakan "Mereka yang melakukan" adalah orang yang melakukan/pelaku/pleger, "Menyuruh melakukan" adalah merupakan bentuk penyertaan dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang menyuruh melakukan (manus domina) dan orang yang disuruh melakukan (manus ministra) peristiwa pidana dimana orang yang disuruh dalam kondisi tidak dapat dipertanggungjawabkan, "yang turut melakukan" adalah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikitanya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang ini bekerja sama secara fisik dalam arti semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan memiliki kesadaran dalam bekerjasama mewujudkan delik;

- Bahwa Pasal 55 ayat (2) KUHP tentang "Penganjur/Pembujuk/Pemancing/Penggerak/uitlokker merupakan bentuk dimana ada sedikitnya dua orang yang dianggap sebagai pelaku yaitu orang yang menganjurkan (intellectual dader) dan yang melaksanakan tindak pidana (pelaku fisik);
- Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah bantuan yang diberikan sebelum atau pada saat tindak pidana terjadi dengan cara memberikan sarana, keterangan atau kesempatan pihak lain (pelaku materiil) untuk melakukan tindak pidana, dalam hal ini niat pembantu adalah sekedar membantu dan tidak berkepentingan secara langsung akan hasil dari tindak pidana;
- Bahwa perbedaan yang mendasar dari Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP adalah berkaitan dengan adanya perencanaan dan adanya meeting of mind, dimana Pasal 55 KUHP seluruh individu terlibat secara aktif dari perencanaan hingga selesainya tindak pidana dan pentingnya adanya aspek willen en witten (mengetahui dan menghendaki) untuk secara bersama-sama mewujudkan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam Pasal 56 KUHP orang yang membantu tidak mengetahui keseluruhan perencanaan dan masuk pada tengah-tengah perbuatan pidana tersebut dilaksanakan dan/atau sebelum perbuatan tersebut terjadi, dan sifat pembantuan dalam pasal ini adalah melengkapi terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa terhadap hal tersebut maka Terdakwa dapat dikenakan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M. H., AllArb dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam struktur kepanitiaan yang mengelola kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melibatkan diri ke dalam kegiatan penambangan tersebut agar kompensasi yang diperuntukkan bagi Masjid dan warga bisa tersalurkan sesuai dengan komitmen Panitia, karena sebelumnya Terdakwa menerima keluhan dari Pemuda dan Masyarakat Nangnung yang menyampaikan kompensasi dari pengelolaan hasil pasir timah tidak sampai kepada Masyarakat Nangnung dan Masjid kemudian Terdakwa berinisiatif memonitor dan mengawasi kompensasi tersebut yang sebelumnya dikelola oleh saksi Agus Riyadi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dihubungi oleh sdr. Hadi yang merupakan Anggota TNI/Korem yang menceritakan tentang masalah kompensasi hasil penambangan tersebut yang tidak disalurkan dengan baik oleh saksi Agus lalu Terdakwa dimintai tolong untuk meluruskan hal tersebut agar dana kompensasi tersebut dapat sesuai sasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Ponton yang menambang di lokasi tersebut, namun berdasar keterangan sdr. Hadi jumlahnya ada sekitar 30 (tiga puluh) unit;
- Bahwa hasil dari pasir timah dipotong untuk Masjid sebesar 10% (sepuluh persen), koordinasi aparat penegak hukum sebesar 10% (sepuluh persen), Panitia sebesar 5% (lima persen), kompensasi warga sebesar 5% (lima persen) dan koordinasi media sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa monitoring dan pengawasan kompensasi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara :

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memeriksa hasil penambangan pada tanggal 24 Maret 2024 yang menghasilkan pasir timah sejumlah 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) kilogram yang dibeli oleh sdr. Weri seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke sdr. Risman, dan oleh karena sdr. Risman hanya bisa menarik uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu sdr. Risman mentransfer uang kepada :
  1. Abdul Hadi sejumlah Rp13.343.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  2. Ari Fariansyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  3. Istari Shola sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  4. Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  5. Nilam Selvira sejumlah Rp4.092.000,00 (empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
  6. Rian Gigis Abdullah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  7. Santika Walidaya sejumlah Rp9.753.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  8. Terdakwa sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  9. Nilam Selvira sejumlah Rp13.764.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  10. Adhi Setiawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kemudian dari total uang berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) diberikan ke penambang oleh sdr. Ari dan sdri. Fita;
- Untuk kompensasi Masjid dibayarkan Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan potongan 10% (sepuluh persen) dari para penambang;
- Sisa hasil pembayaran penambang dan koordinasi sebanyak 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) masih ada di rekening sdr. Risman, kemudian Terdakwa meminta sdr. Risman mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) kepada saksi Andi Kustiawan untuk didistribusikan kepada Warga Desa Nangnung;

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada sdr. Suhardan yaitu teman dari saksi Agus dengan alasan untuk membayar hutang sewa mobil yang dilakukan oleh saksi Agus dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan untuk bon warung Panitia dengan total Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ari dan sdri. Fita dimana Terdakwa menambahkan uang pribadi Terdakwa untuk membayar bon tersebut dengan harapan akan diganti oleh saksi Agus;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.209 (seribu dua ratus sembilan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Ardi (saksi Hardi Mardeni) sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) kilogram dan sdr. Weri sebanyak 902 (sembilan ratus dua kilogram) sehingga seharga seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp123.318.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diajak Pemuda Nangnung untuk membicarakan masalah kompensasi warga lalu Terdakwa mengatakan uang kompensasi tersebut sudah ada pada Terdakwa dan dari kesepakatan warga uang tersebut akan diserahkan kepada saksi Andi Kustiawan karena dianggap sebagai orang yang amanah dan mantan Ketua RT, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi Andi Kustiawan;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 kepanitiaan diambil alih oleh sdr. Hadi dan hari itu penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.068 (Seribu enam puluh delapan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Weri seharga seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp108.936.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung meminta potongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kompensasi warga dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Masjid dimana uang tersebut langsung saksi serahkan ke saksi Andi saat sedang berada di rumah sdr. Martoni;
- Bahwa yang memberikan uang koordinasi tersebut adalah sdr. Hadi, untuk koordinasi eksternal sebesar 10% (sepuluh persen) dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Media dititipkan oleh sdr. Hadi kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang menyerahkan kepada Media;
- Bahwa sdr. Hadi pernah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan semua kepada Media yang datang kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan catatan Terdakwa media yang menerima uang koordinasi lebih dari 39 orang karena setiap harinya jumlah media yang datang untuk meminta uang koordinasi bertambah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membagi uang koordinasi media, yang pertama Terdakwa berikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan media diberi uang koordinasi adalah untuk meredam berita tentang penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa sdr. Hadi dan sdr. Weri merupakan Anggota TNI (Korem) sedangkan saksi Hardi merupakan pimpinan redaksi Media Online Kejari Berita.com;
- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut sejak tanggal 22 Maret 2024 saat sedang rapat di Masjid At-Taqwa, dimana diketahui kegiatan penambangan tersebut hanya menggunakan koordinasi ke pihak tertentu yaitu APH (Korem) dan Media dengan harapan jika terjadi masalah maka APH (Korem) dan Media bisa meredam hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S berwarna Ungu dengan Nomor Imei 1 : 86830468145934 dan Imei 2 : 868304068145926;
2. 1 (satu) buah Laptop berwarna abu – abu merk HP beserta cas;
3. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA nomor 5260 5120 4699 6334;
4. 10 (sepuluh) lembar Screenshot/hasil tangkapan layar yang berisi hasil percakapan;
5. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan hasil timah total tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1.277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima) Kilogram dikali Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan hasil sebesar Rp 118.807.500,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan hasil timah catatan atas nama WADI sebesar 50 Kg (lima puluh Kilogram), FEBI sebesar 121,5 Kg (seratus dua

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma lima Kilogram), WAHAB sebesar 184 Kg (seratus delapan puluh empat Kilogram), DONI/GODOI sebesar 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram), OPANK sebesar 189 Kg (seratus delapan puluh sembilan Kilogram), AIM sebesar 28 Kg (dua puluh delapan Kilogram), UKENG sebesar 244,5 Kg (dua ratus empat puluh empat koma lima Kilogram), AMBOK sebesar 42 Kg (empat puluh dua Kilogram), CANDRA sebesar 125 Kg (seratus dua puluh koma lima Kilogram), DONI RIAN sebesar 203 Kg (dua ratus tiga Kilogram), FAISAL sebesar 57,5 Kg (lima puluh tujuh koma lima Kilogram) dengan jumlah 1277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima kilogram);

7. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan total hasil timah tanggal 22 Maret 2024 Total timah sebesar : 279 Kg (dua ratus tujuh puluh sembilan kilogram) dan tanggal 23 Maret 2024 Total Timah sebesar : 1267 Kg (seribu dua ratus enam puluh tujuh kilogram);
8. 1 (satu) lembar kertas Folio yang berisi tulisan tangan catatan pembagian uang Koordinasi, Panitia dan Masjid;
9. 1 (satu) lembar kertas hasil rekap penambangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan uang sebesar Rp 129.234.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
10. 3 (tiga) lembar Natulen Rapat Musyawarah Mufakat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
11. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan total uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
13. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan pembayaran kepada penambang – penambang atas nama DENI/RIAN, OKENG, HADI KOR, MARTIN BCA, OPAN, FAISAL dan FEBI tanggal 23 Maret 2024;
14. 1 (satu) lembar Rincian Pendapatan Bagi Hasil dari tanggal 10 Maret 2024 s/d 16 Maret 2024;
15. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Air Kantung);
16. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Nelayan II (Tanah Hongkong));

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) lembar Surat Proker Kegiatan Ponton Rajuk Tower di Lingkungan Air Kantung Sungailiat (Kolong Buntu) Periode 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
18. 2 (dua) buah buku jilidan tentang Pengurus Panitia Ponton Rajuk Tower wilayah Kolong Buntu Lingkungan Air Kantung Sungailiat – Bangka Prov. Kep. Babel;
19. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Buntu Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
20. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan catatan Daftar Media sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
21. 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang Koordinasi, persenan dan penghirungan jumlah uang;
22. 10 (sepuluh) buah buku Nota Kontan Pembayaran yang berisi pembayaran pasir timah kepada penambang – penambang;
23. 1 (satu) buah buku Kasbon (Bon Pinjem Dana);
24. 1 (satu) lembar Rincian Biaya keluar dan Kasbon sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp 12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Pembayaran yang terdiri dari :
  - 4 (empat) lembar Nota pembayaran atas nama FEBI;
  - 5 (lima) lembar Nota pembayaran atas nama UKENG;
  - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama WAHAB;
  - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama AMBO;
  - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama WADI;
  - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama OPAN;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DODI;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ALOY;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ANAN;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DONI Als GODOI;
26. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan potongan tanggal 23 Maret 2024 dan 24 Maret 2024;
27. 5 (lima) lembar Nota pembelian perakitan Ponton atas nama Mesjid sebesar Rp 10.263.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
28. 2 (dua) lembar Nota pembayaran Jasa sewa PC MINI;
29. 1 (satu) lembar Nota pengeluaran atas nama AGUS untuk buat tenda;
30. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan rincian dari sisa hasil usaha untuk panitia;
31. 5 (lima) lembar bukti transfer terdiri dari :

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JULIANA DINCE sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama ARI FARIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama FEBBY FEGUSTA SE sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JUHAIMA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama NILAM SELVIRA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
32. 28 (dua puluh delapan) lembar bukti pembayaran biaya administrasi terdiri dari:
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YUK EKA yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama AMBO yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama WAHAB yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ALFATIH HANIF yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama RANGER yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya Sewa PC/Exavator BUAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama TAMAN yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 17 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YAYAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama BODOY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama HAMZAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama H. IWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama MARSE yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama OPAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
33. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya wartawan dan biaya pencabutan Berita RT 02 kepada Wartawan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
34. 8 (delapan) lembar bukti pembayaran administrasi Gelombang kedua terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama EDY IRAWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
  - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBI AGUSTA yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Kolong Buntu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FIRMAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
35. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Take over Gelombang Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ARI

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANSYAH/AYI yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

36. 15 (lima belas) rangkap bukti pembayaran kosong yang disiapkan untuk pembayaran Pemilik Ponton;
37. 1 (satu) lembar Rincian biaya masuk dan keluar;
38. 5 (lima) lembar Rincian pendapatan bagi hasil;
39. 2 (dua) unit Mesin Pompa Tanah;
40. 2 (dua) unit Mesin gelondong tali rajuk;
41. 3 (tiga) batang pipa rajuk;
42. 2 (dua) selang Spiral;
43. 1 (satu) jangkar;
44. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tanggal 5 Februari 2024 saksi Agus Riyadi memiliki ide mengelola penambangan pasir timah di lokasi Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berencana untuk menggandeng kelompok Pemuda Desa Nangnung, lalu saksi Agus Riyadi mengajak saksi Sumitro untuk mendatangi sdr. H. Adenan selaku Ketua Yayasan At-Taqwa dengan menyampaikan bahwa sebagian hasil penambangan akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid sehingga sdr. H. Adenan tidak keberatan jika Masjid dilibatkan;
2. Bahwa saksi Agus kemudian menjelaskan kepada tokoh Pemuda Nangnung tentang pengelolaan penambangan kemudian menyusun struktur Panitia Ponton Rajuk dengan menggunakan logo Kantor Penasehat Hukum milik sdr. Bujang Musa, sebagai berikut :
  - Penasehat Hukum :
    1. Bujang Musa, S.H., M.H.
    2. Jemi Mazka Ulfa, S.H.
  - Pembina Kepengurusan :
    1. H. Adenan
    2. Umar Syahrial
    3. Artam
    4. Edison
    5. Dani

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yahya Bachrin

• Pengurus :

1. Sumitro selaku Ketua
2. Yancui selaku Wakil Ketua
3. Agus Riyadhi selaku Sekretaris
4. Hari Purnomo selaku Bendahara

• Divisi Produksi :

1. Divisi Pengambilan Timah tiap Ponton :
  - Yudi als Black selaku Ketua
  - Yus selaku Anggota
  - Eja selaku Anggota
  - Trek selaku Anggota
  - Bram selaku Anggota
  - Tony als Butun selaku Anggota
  - Pajrin selaku Anggota
2. Divisi Keamanan
  - Santo selaku Ketua
  - Akbar selaku Anggota
  - Rijun selaku Anggota
3. Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui ada kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam struktur kepanitiaan yang mengelola kegiatan penambangan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa melibatkan diri ke dalam kegiatan penambangan tersebut agar kompensasi yang diperuntukkan bagi Masjid dan warga bisa tersalurkan sesuai dengan komitmen Panitia, karena sebelumnya Terdakwa menerima keluhan dari Pemuda dan Masyarakat Nangnung yang menyampaikan kompensasi dari pengelolaan hasil pasir timah tidak sampai kepada Masyarakat Nangnung dan Masjid kemudian Terdakwa berinisiatif memonitor dan mengawasi kompensasi tersebut yang sebelumnya dikelola oleh saksi Agus Riyadi;
6. Bahwa Terdakwa juga pernah dihubungi oleh sdr. Hadi yang merupakan Anggota TNI/Korem yang menceritakan tentang masalah kompensasi hasil penambangan tersebut yang tidak disalurkan dengan baik oleh saksi Agus lalu Terdakwa dimintai tolong untuk meluruskan hal tersebut agar dana kompensasi tersebut dapat sesuai sasaran;

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Ponton yang menambang di lokasi tersebut, namun berdasark keterangan sdr. Hadi jumlahnya ada sekitar 30 (tiga puluh) unit;
8. Bahwa hasil dari pasir timah dipotong untuk Masjid sebesar 10% (sepuluh persen), koordinasi aparat penegak hukum sebesar 10% (sepuluh persen), Panitia sebesar 5% (lima persen), kompensasi warga sebesar 5% (lima persen) dan koordinasi media sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
9. Bahwa monitoring dan pengawasan kompensasi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara :
  - Terdakwa memeriksa hasil penambangan pada tanggal 24 Maret 2024 yang menghasilkan pasir timah sejumlah 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) kilogram yang dibeli oleh sdr. Weri seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke sdr. Risman, dan oleh karena sdr. Risman hanya bisa menarik uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu sdr. Risman mentransfer uang kepada :
    1. Abdul Hadi sejumlah Rp13.343.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
    2. Ari Fariansyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    3. Istari Shola sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
    4. Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    5. Nilam Selvira sejumlah Rp4.092.000,00 (empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
    6. Rian Gigis Abdullah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
    7. Santika Walidaya sejumlah Rp9.753.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
    8. Terdakwa sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
    9. Nilam Selvira sejumlah Rp13.764.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
    10. Adhi Setiawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Kemudian dari total uang berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) diberikan ke penambang oleh sdr. Ari dan sdri. Fita;

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kompensasi Masjid dibayarkan Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan potongan 10% (sepuluh persen) dari para penambang;
  - Sisa hasil pembayaran penambang dan koordinasi sebanyak 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) masih ada di rekening sdr. Risman, kemudian Terdakwa meminta sdr. Risman mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan;
10. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) kepada saksi Andi Kustiawan untuk didistribusikan kepada Warga Desa Nangnung;
11. Bahwa sisa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada sdr. Suhardan yaitu teman dari saksi Agus dengan alasan untuk membayar hutang sewa mobil yang dilakukan oleh saksi Agus dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan untuk bon warung Panitia dengan total Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ari dan sdr. Fita dimana Terdakwa menambahkan uang pribadi Terdakwa untuk membayar bon tersebut dengan harapan akan diganti oleh saksi Agus;
12. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.209 (seribu dua ratus sembilan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Ardi (saksi Hardi Mardeni) sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) kilogram dan sdr. Weri sebanyak 902 (sembilan ratus dua kilogram) sehingga seharga seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp123.318.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diajak Pemuda Nangnung untuk membicarakan masalah kompensasi warga lalu Terdakwa mengatakan uang kompensasi tersebut sudah ada pada Terdakwa dan dari kesepakatan warga uang tersebut akan diserahkan kepada saksi Andi Kustiawan karena dianggap sebagai orang yang amanah dan mantan Ketua RT, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi Andi Kustiawan;
14. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 kepanitiaan diambil alih oleh sdr. Hadi dan hari itu penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.068 (Seribu enam puluh delapan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Weri seharga seharga Rp102.000,00

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp108.936.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung meminta potongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kompensasi warga dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Masjid dimana uang tersebut langsung saksi serahkan ke saksi Andi saat sedang berada di rumah sdr. Martoni;

15. Bahwa yang memberikan uang koordinasi tersebut adalah sdr. Hadi, untuk koordinasi eksternal sebesar 10% (sepuluh persen) dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Media dititipkan oleh sdr. Hadi kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang menyerahkan kepada Media;
16. Bahwa sdr. Hadi pernah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan semua kepada Media yang datang kepada Terdakwa;
17. Bahwa berdasarkan catatan Terdakwa media yang menerima uang koordinasi lebih dari 39 orang karena setiap harinya jumlah media yang datang untuk meminta uang koordinasi bertambah;
18. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membagi uang koordinasi media, yang pertama Terdakwa berikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
19. Bahwa tujuan media diberi uang koordinasi adalah untuk meredam berita tentang penambangan di lokasi tersebut;
20. Bahwa sdr. Hadi dan sdr. Weri merupakan Anggota TNI (Korem) sedangkan saksi Hardi merupakan pimpinan redaksi Media Online Kejar Berita.com;
21. Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut sejak tanggal 22 Maret 2024 saat sedang rapat di Masjid At-Taqwa, dimana diketahui kegiatan penambangan tersebut hanya menggunakan koordinasi ke pihak tertentu yaitu APH (Korem) dan Media dengan harapan jika terjadi masalah maka APH (Korem) dan Media bisa meredam hal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur "barang siapa" yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Firada Basrah, S.T. Bin Basrah yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

## Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e.

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sekira tanggal 5 Februari 2024 saksi Agus Riyadi memiliki ide mengelola penambangan pasir timah di lokasi Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berencana untuk menggandeng kelompok Pemuda Desa Nangnung, lalu saksi Agus Riyadi mengajak saksi Sumitro untuk mendatangi sdr. H. Adenan selaku Ketua Yayasan At-Taqwa dengan menyampaikan bahwa sebagian hasil penambangan akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid sehingga sdr. H. Adenan tidak keberatan jika Masjid dilibatkan, kemudian saksi Agus menjelaskan kepada tokoh Pemuda Nangnung tentang pengelolaan penambangan kemudian menyusun struktur Panitia Ponton Rajuk dengan menggunakan logo Kantor Penasehat Hukum milik sdr. Bujang Musa, sebagai berikut :

- Penasehat Hukum :
  1. Bujang Musa, S.H., M.H.
  2. Jemi Mazka Ulfa, S.H.
- Pembina Kepengurusan :
  1. H. Adenan
  2. Umar Syahril
  3. Artam
  4. Edison
  5. Dani
  6. Yahya Bachrin
- Pengurus :
  1. Sumitro selaku Ketua
  2. Yancui selaku Wakil Ketua
  3. Agus Riyadhi selaku Sekretaris
  4. Hari Purnomo selaku Bendahara
- Divisi Produksi :
  1. Divisi Pengambilan Timah tiap Ponton :
    - Yudi als Black selaku Ketua
    - Yus selaku Anggota
    - Eja selaku Anggota
    - Trek selaku Anggota
    - Bram selaku Anggota

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tony als Butun selaku Anggota
- Pajrin selaku Anggota

## 2. Divisi Keamanan

- Santo selaku Ketua
- Akbar selaku Anggota
- Rijun selaku Anggota

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengetahui ada kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun Terdakwa tidak termasuk dalam struktur kepanitiaan yang mengelola kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melibatkan diri ke dalam kegiatan penambangan tersebut agar kompensasi yang diperuntukkan bagi Masjid dan warga bisa tersalurkan sesuai dengan komitmen Panitia, karena sebelumnya Terdakwa menerima keluhan dari Pemuda dan Masyarakat Nangnung yang menyampaikan kompensasi dari pengelolaan hasil pasir timah tidak sampai kepada Masyarakat Nangnung dan Masjid kemudian Terdakwa berinisiatif memonitor dan mengawasi kompensasi tersebut yang sebelumnya dikelola oleh saksi Agus Riyadi, dan Terdakwa juga pernah dihubungi oleh sdr. Hadi yang merupakan Anggota TNI/Korem yang menceritakan tentang masalah kompensasi hasil penambangan tersebut yang tidak disalurkan dengan baik oleh saksi Agus lalu Terdakwa dimintai tolong untuk meluruskan hal tersebut agar dana kompensasi tersebut dapat sesuai sasaran;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Ponton yang menambang di lokasi tersebut, namun berdasarkan keterangan sdr. Hadi jumlahnya ada sekitar 30 (tiga puluh) unit dan Terdakwa mengetahui hasil dari pasir timah dipotong untuk Masjid sebesar 10% (sepuluh persen), koordinasi aparat penegak hukum sebesar 10% (sepuluh persen), Panitia sebesar 5% (lima persen), kompensasi warga sebesar 5% (lima persen) dan koordinasi media sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang bahwa monitoring dan pengawasan kompensasi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara :

- Terdakwa memeriksa hasil penambangan pada tanggal 24 Maret 2024 yang menghasilkan pasir timah sejumlah 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) kilogram yang dibeli oleh sdr. Weri seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke sdr. Risman, dan oleh karena sdr. Risman

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa menarik uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu sdr. Risman mentransfer uang kepada :

1. Abdul Hadi sejumlah Rp13.343.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  2. Ari Fariansyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  3. Istari Shola sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  4. Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  5. Nilam Selvira sejumlah Rp4.092.000,00 (empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
  6. Rian Gigis Abdullah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  7. Santika Walidaya sejumlah Rp9.753.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  8. Terdakwa sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  9. Nilam Selvira sejumlah Rp13.764.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  10. Adhi Setiawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kemudian dari total uang berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) diberikan ke penambang oleh sdr. Ari dan sdr. Fita;
  - Untuk kompensasi Masjid dibayarkan Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan potongan 10% (sepuluh persen) dari para penambang;
  - Sisa hasil pembayaran penambang dan koordinasi sebanyak 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) masih ada di rekening sdr. Risman, kemudian Terdakwa meminta sdr. Risman mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) kepada saksi Andi Kustiawan untuk didistribusikan kepada Warga Desa Nangnung dan sisa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada sdr. Suhardan yaitu teman dari saksi Agus dengan alasan untuk membayar hutang sewa mobil yang dilakukan oleh saksi Agus dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan untuk bon warung Panitia dengan total Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ari dan sdr. Fita dimana Terdakwa menambahkan uang pribadi Terdakwa untuk membayar bon tersebut dengan harapan akan diganti oleh saksi Agus;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.209 (seribu dua ratus sembilan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Ardi (saksi Hardi Mardeni) sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) kilogram dan sdr. Weri sebanyak 902 (sembilan ratus dua kilogram) sehingga seharga seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp123.318.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) lalu pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diajak Pemuda Nangnung untuk membicarakan masalah kompensasi warga lalu Terdakwa mengatakan uang kompensasi tersebut sudah ada pada Terdakwa dan dari kesepakatan warga uang tersebut akan diserahkan kepada saksi Andi Kustiawan karena dianggap sebagai orang yang amanah dan mantan Ketua RT, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi Andi Kustiawan;

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 kepanitiaan diambil alih oleh sdr. Hadi dan hari itu penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.068 (Seribu enam puluh delapan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Weri seharga seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp108.936.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung meminta potongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kompensasi warga dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Masjid dimana uang tersebut langsung saksi serahkan ke saksi Andi saat sedang berada di rumah sdr. Martoni;

Menimbang bahwa yang memberikan uang koordinasi tersebut adalah sdr. Hadi, untuk koordinasi eksternal sebesar 10% (sepuluh persen) dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Media dititipkan oleh sdr. Hadi kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang menyerahkan kepada Media dimana sdr. Hadi pernah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan semua kepada Media yang datang kepada Terdakwa dan berdasarkan catatan Terdakwa media yang menerima uang koordinasi lebih dari 39 orang karena setiap harinya jumlah media yang datang untuk meminta uang koordinasi bertambah, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membagi uang koordinasi media, yang pertama Terdakwa berikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan media diberi uang koordinasi adalah untuk meredam berita tentang penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa sdr. Hadi dan sdr. Weri merupakan Anggota TNI (Korem) sedangkan saksi Hardi merupakan pimpinan redaksi Media Online Kejara Berita.com;

Menimbang bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut sejak tanggal 22 Maret 2024 saat sedang rapat di Masjid At-Taqwa, dimana diketahui kegiatan penambangan tersebut hanya menggunakan koordinasi ke pihak tertentu yaitu APH (Korem) dan Media dengan harapan jika terjadi masalah maka APH (Korem) dan Media bisa meredam hal tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melibatkan diri ke dalam kegiatan penambangan walaupun tidak secara langsung secara fisik melakukan penambangan namun perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan "melakukan penambangan" dan penambangan tersebut dilakukan Terdakwa "tanpa izin usaha pertambangan", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan "turut melakukan" adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa mengetahui ada kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikoordinir oleh Panitia namun Terdakwa tidak termasuk dalam struktur kepanitiaan yang mengelola kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melibatkan diri ke dalam kegiatan penambangan tersebut agar kompensasi yang diperuntukkan bagi Masjid dan warga bisa tersalurkan sesuai dengan komitmen Panitia, karena sebelumnya Terdakwa

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keluhan dari Pemuda dan Masyarakat Nangnung yang menyampaikan kompensasi dari pengelolaan hasil pasir timah tidak sampai kepada Masyarakat Nangnung dan Masjid kemudian Terdakwa berinisiatif memonitor dan mengawasi kompensasi tersebut yang sebelumnya dikelola oleh saksi Agus Riyadi, dan Terdakwa juga pernah dihubungi oleh sdr. Hadi yang merupakan Anggota TNI/Korem yang menceritakan tentang masalah kompensasi hasil penambangan tersebut yang tidak disalurkan dengan baik oleh saksi Agus lalu Terdakwa dimintai tolong untuk meluruskan hal tersebut agar dana kompensasi tersebut dapat sesuai sasaran;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Ponton yang menambang di lokasi tersebut, namun berdasarkan keterangan sdr. Hadi jumlahnya ada sekitar 30 (tiga puluh) unit dan Terdakwa mengetahui hasil dari pasir timah dipotong untuk Masjid sebesar 10% (sepuluh persen), koordinasi aparat penegak hukum sebesar 10% (sepuluh persen), Panitia sebesar 5% (lima persen), kompensasi warga sebesar 5% (lima persen) dan koordinasi media sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang bahwa monitoring dan pengawasan kompensasi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara :

- Terdakwa memeriksa hasil penambangan pada tanggal 24 Maret 2024 yang menghasilkan pasir timah sejumlah 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) kilogram yang dibeli oleh sdr. Weri seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke sdr. Risman, dan oleh karena sdr. Risman hanya bisa menarik uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu sdr. Risman mentransfer uang kepada :
  1. Abdul Hadi sejumlah Rp13.343.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  2. Ari Fariansyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  3. Istari Shola sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  4. Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  5. Nilam Selvira sejumlah Rp4.092.000,00 (empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
  6. Rian Gigis Abdullah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  7. Santika Walidaya sejumlah Rp9.753.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  8. Terdakwa sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Nilam Selvira sejumlah Rp13.764.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
10. Adhi Setiawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kemudian dari total uang berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) diberikan ke penambang oleh sdr. Ari dan sdri. Fita;
  - Untuk kompensasi Masjid dibayarkan Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan potongan 10% (sepuluh persen) dari para penambang;
  - Sisa hasil pembayaran penambang dan koordinasi sebanyak 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) masih ada di rekening sdr. Risman, kemudian Terdakwa meminta sdr. Risman mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) kepada saksi Andi Kustiawan untuk didistribusikan kepada Warga Desa Nangnung dan sisa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada sdr. Suhardan yaitu teman dari saksi Agus dengan alasan untuk membayar hutang sewa mobil yang dilakukan oleh saksi Agus dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan untuk bon warung Panitia dengan total Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ari dan sdri. Fita dimana Terdakwa menambahkan uang pribadi Terdakwa untuk membayar bon tersebut dengan harapan akan diganti oleh saksi Agus;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.209 (seribu dua ratus sembilan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Ardi (saksi Hardi Mardeni) sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) kilogram dan sdr. Weri sebanyak 902 (sembilan ratus dua kilogram) seharga seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp123.318.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) lalu pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diajak Pemuda Nangnung untuk membicarakan masalah kompensasi warga lalu Terdakwa mengatakan uang kompensasi tersebut sudah ada pada Terdakwa dan dari kesepakatan warga uang tersebut akan diserahkan kepada saksi Andi Kustiawan karena dianggap sebagai orang yang amanah dan mantan Ketua RT, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi Andi Kustiawan;

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 kepaniteraan diambil alih oleh sdr. Hadi dan hari itu penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.068 (Seribu enam puluh delapan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Weri seharga seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp108.936.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung meminta potongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kompensasi warga dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Masjid dimana uang tersebut langsung saksi serahkan ke saksi Andi saat sedang berada di rumah sdr. Martoni;

Menimbang bahwa yang memberikan uang koordinasi tersebut adalah sdr. Hadi, untuk koordinasi eksternal sebesar 10% (sepuluh persen) dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Media dititipkan oleh sdr. Hadi kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang menyerahkan kepada Media dimana sdr. Hadi pernah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan semua kepada Media yang datang kepada Terdakwa dan berdasarkan catatan Terdakwa media yang menerima uang koordinasi lebih dari 39 orang karena setiap harinya jumlah media yang datang untuk meminta uang koordinasi bertambah, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membagi uang koordinasi media, yang pertama Terdakwa berikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan media diberi uang koordinasi adalah untuk meredam berita tentang penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa sdr. Hadi dan sdr. Weri merupakan Anggota TNI (Korem) sedangkan saksi Hardi merupakan pimpinan redaksi Media Online Kejari Berita.com;

Menimbang bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut sejak tanggal 22 Maret 2024 saat sedang rapat di Masjid At-Taqwa, dimana diketahui kegiatan penambangan tersebut hanya menggunakan koordinasi ke pihak tertentu yaitu APH (Korem) dan Media dengan harapan jika terjadi masalah maka APH (Korem) dan Media bisa meredam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa dan saksi Agus Riyadi walaupun tidak secara langsung secara fisik melakukan penambangan namun berperan bersama-sama dalam melakukan perbuatan penambangan ini, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang "turut melakukan" perbuatan tersebut;

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S berwarna Ungu dengan Nomor Imei 1 : 86830468145934 dan Imei 2 : 868304068145926;
2. 1 (satu) buah Laptop berwarna abu – abu merk HP beserta cas;
3. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA nomor 5260 5120 4699 6334;
4. 10 (sepuluh) lembar Screenshot/hasil tangkapan layar yang berisi hasil percakapan;
5. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan hasil timah total tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1.277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima) Kilogram dikali Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan hasil sebesar Rp 118.807.500,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan hasil timah catatan atas nama WADI sebesar 50 Kg (lima puluh Kilogram), FEBI sebesar 121,5 Kg (seratus dua

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma lima Kilogram), WAHAB sebesar 184 Kg (seratus delapan puluh empat Kilogram), DONI/GODOI sebesar 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram), OPANK sebesar 189 Kg (seratus delapan puluh sembilan Kilogram), AIM sebesar 28 Kg (dua puluh delapan Kilogram), UKENG sebesar 244,5 Kg (dua ratus empat puluh empat koma lima Kilogram), AMBOK sebesar 42 Kg (empat puluh dua Kilogram), CANDRA sebesar 125 Kg (seratus dua puluh koma lima Kilogram), DONI RIAN sebesar 203 Kg (dua ratus tiga Kilogram), FAISAL sebesar 57,5 Kg (lima puluh tujuh koma lima Kilogram) dengan jumlah 1277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima kilogram);

7. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan total hasil timah tanggal 22 Maret 2024 Total timah sebesar : 279 Kg (dua ratus tujuh puluh sembilan kilogram) dan tanggal 23 Maret 2024 Total Timah sebesar : 1267 Kg (seribu dua ratus enam puluh tujuh kilogram);
8. 1 (satu) lembar kertas Folio yang berisi tulisan tangan catatan pembagian uang Koordinasi, Panitia dan Masjid;
9. 1 (satu) lembar kertas hasil rekap penambangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan uang sebesar Rp 129.234.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
10. 3 (tiga) lembar Natulen Rapat Musyawarah Mufakat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
11. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan total uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
13. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan pembayaran kepada penambang – penambang atas nama DENI/RIAN, OKENG, HADI KOR, MARTIN BCA, OPAN, FAISAL dan FEBI tanggal 23 Maret 2024;
14. 1 (satu) lembar Rincian Pendapatan Bagi Hasil dari tanggal 10 Maret 2024 s/d 16 Maret 2024;
15. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Air Kantung);
16. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Nelayan II (Tanah Hongkong));

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) lembar Surat Proker Kegiatan Ponton Rajuk Tower di Lingkungan Air Kantung Sungailiat (Kolong Buntu) Periode 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
18. 2 (dua) buah buku jilidan tentang Pengurus Panitia Ponton Rajuk Tower wilayah Kolong Buntu Lingkungan Air Kantung Sungailiat – Bangka Prov. Kep. Babel;
19. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Buntu Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
20. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan catatan Daftar Media sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
21. 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang Koordinasi, persenan dan penghirungan jumlah uang;
22. 10 (sepuluh) buah buku Nota Kontan Pembayaran yang berisi pembayaran pasir timah kepada penambang – penambang;
23. 1 (satu) buah buku Kasbon (Bon Pinjem Dana);
24. 1 (satu) lembar Rincian Biaya keluar dan Kasbon sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp 12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Pembayaran yang terdiri dari :
  - 4 (empat) lembar Nota pembayaran atas nama FEBI;
  - 5 (lima) lembar Nota pembayaran atas nama UKENG;
  - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama WAHAB;
  - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama AMBO;
  - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama WADI;
  - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama OPAN;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DODI;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ALOY;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ANAN;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DONI Als GODOI;
26. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan potongan tanggal 23 Maret 2024 dan 24 Maret 2024;
27. 5 (lima) lembar Nota pembelian perakitan Ponton atas nama Mesjid sebesar Rp 10.263.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
28. 2 (dua) lembar Nota pembayaran Jasa sewa PC MINI;
29. 1 (satu) lembar Nota pengeluaran atas nama AGUS untuk buat tenda;
30. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan rincian dari sisa hasil usaha untuk panitia;
31. 5 (lima) lembar bukti transfer terdiri dari :

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JULIANA DINCE sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama ARI FARIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama FEBBY FEGUSTA SE sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JUHAIMA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama NILAM SELVIRA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
32. 28 (dua puluh delapan) lembar bukti pembayaran biaya administrasi terdiri dari:
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YUK EKA yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama AMBO yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama WAHAB yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ALFATIH HANIF yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama RANGER yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya Sewa PC/Exavator BUAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama TAMAN yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 17 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YAYAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama BODOY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama HAMZAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama H. IWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama MARSE yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama OPAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
33. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya wartawan dan biaya pencabutan Berita RT 02 kepada Wartawan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
34. 8 (delapan) lembar bukti pembayaran administrasi Gelombang kedua terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama EDY IRAWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
  - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBI AGUSTA yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Kolong Buntu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FIRMAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
35. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Take over Gelombang Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ARI

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANSYAH/AYI yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

36. 15 (lima belas) rangkap bukti pembayaran kosong yang disiapkan untuk pembayaran Pemilik Ponton;
37. 1 (satu) lembar Rincian biaya masuk dan keluar;
38. 5 (lima) lembar Rincian pendapatan bagi hasil;
39. 2 (dua) unit Mesin Pompa Tanah;
40. 2 (dua) unit Mesin gelondong tali rajuk;
41. 3 (tiga) batang pipa rajuk;
42. 2 (dua) selang Spiral;
43. 1 (satu) jangkar;
44. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain atas nama Agus Riyadi Bin Gunawan, maka akan dikembalikan Ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Agus Riyadi Bin Gunawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil, kemudian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan akan berdampak terhadap kehidupan biota di Sungai kolong buntu, Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Firada Basrah, S.T. Bin Basrah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S berwarna Ungu dengan Nomor Imei 1 : 86830468145934 dan Imei 2 : 868304068145926;
  2. 1 (satu) buah Laptop berwarna abu – abu merk HP beserta cas;
  3. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA nomor 5260 5120 4699 6334;
  4. 10 (sepuluh) lembar Screenshot/hasil tangkapan layar yang berisi hasil percakapan;
  5. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan hasil timah total tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1.277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima) Kilogram dikali Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan hasil sebesar Rp 118.807.500,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
  6. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan hasil timah catatan atas nama WADI sebesar 50 Kg (lima puluh Kilogram), FEBI sebesar 121,5 Kg (seratus dua puluh satu koma lima Kilogram), WAHAB sebesar 184 Kg (seratus delapan puluh empat Kilogram), DONI/GODOI sebesar 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram), OPANK sebesar 189 Kg (seratus delapan puluh sembilan Kilogram), AIM sebesar 28 Kg (dua puluh delapan Kilogram), UKENG sebesar 244,5 Kg (dua ratus empat puluh empat koma lima Kilogram), AMBOK sebesar 42 Kg (empat puluh dua Kilogram), CANDRA sebesar 125 Kg (seratus dua puluh koma lima Kilogram), DONI RIAN sebesar 203 Kg (dua ratus tiga Kilogram), FAISAL sebesar 57,5 Kg (lima puluh tujuh koma lima Kilogram) dengan jumlah 1277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima kilogram);

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan total hasil timah tanggal 22 Maret 2024 Total timah sebesar : 279 Kg (dua ratus tujuh puluh sembilan kilogram) dan tanggal 23 Maret 2024 Total Timah sebesar : 1267 Kg (seribu dua ratus enam puluh tujuh kilogram);
8. 1 (satu) lembar kertas Folio yang berisi tulisan tangan catatan pembagian uang Koordinasi, Panitia dan Masjid;
9. 1 (satu) lembar kertas hasil rekap penambangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan uang sebesar Rp 129.234.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
10. 3 (tiga) lembar Natulen Rapat Musyawarah Mufakat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
11. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan total uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
13. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan pembayaran kepada penambang – penambang atas nama DENI/RIAN, OKENG, HADI KOR, MARTIN BCA, OPAN, FAISAL dan FEBI tanggal 23 Maret 2024;
14. 1 (satu) lembar Rincian Pendapatan Bagi Hasil dari tanggal 10 Maret 2024 s/d 16 Maret 2024;
15. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Air Kantung);
16. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Nelayan II (Tanah Hongkong));
17. 2 (dua) lembar Surat Proker Kegiatan Ponton Rajuk Tower di Lingkungan Air Kantung Sungailiat (Kolong Buntu) Periode 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
18. 2 (dua) buah buku jilidan tentang Pengurus Panitia Ponton Rajuk Tower wilayah Kolong Buntu Lingkungan Air Kantung Sungailiat – Bangka Prov. Kep. Babel;
19. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Buntu Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
20. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan catatan Daftar Media sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang Koordinasi, persenan dan penghirungan jumlah uang;
22. 10 (sepuluh) buah buku Nota Kontan Pembayaran yang berisi pembayaran pasir timah kepada penambang – penambang;
23. 1 (satu) buah buku Kasbon (Bon Pinjem Dana);
24. 1 (satu) lembar Rincian Biaya keluar dan Kasbon sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp 12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Pembayaran yang terdiri dari :
  - 4 (empat) lembar Nota pembayaran atas nama FEBI;
  - 5 (lima) lembar Nota pembayaran atas nama UKENG;
  - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama WAHAB;
  - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama AMBO;
  - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama WADI;
  - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama OPAN;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DODI;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ALOY;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ANAN;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DONI Als GODOI;
26. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan potongan tanggal 23 Maret 2024 dan 24 Maret 2024;
27. 5 (lima) lembar Nota pembelian perakitan Ponton atas nama Mesjid sebesar Rp 10.263.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
28. 2 (dua) lembar Nota pembayaran Jasa sewa PC MINI;
29. 1 (satu) lembar Nota pengeluaran atas nama AGUS untuk buat tenda;
30. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan rincian dari sisa hasil usaha untuk panitia;
31. 5 (lima) lembar bukti transfer terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JULIANA DINCE sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama ARI FARIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama FEBBY FEGUSTA SE sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JUHAIMA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama NILAM SELVIRA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
- 32. 28 (dua puluh delapan) lembar bukti pembayaran biaya administrasi terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YUK EKA yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama AMBO yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama WAHAB yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ALFATIH HANIF yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama RANGER yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya Sewa PC/Exavator BUAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama TAMAN yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 17 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YAYAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama BODOY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama HAMZAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama H. IWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama MARSE yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama OPAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 33. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya wartawan dan biaya pencabutan Berita RT 02 kepada Wartawan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 34. 8 (delapan) lembar bukti pembayaran administrasi Gelombang kedua terdiri dari:
  - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama EDY IRAWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
  - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponton atas nama FEBI AGUSTA yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Kolong Buntu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FIRMAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

35. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Take over Gelombang Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ARI AFRIANSYAH/AYI yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

36. 15 (lima belas) rangkap bukti pembayaran kosong yang disiapkan untuk pembayaran Pemilik Ponton;

37. 1 (satu) lembar Rincian biaya masuk dan keluar;

38. 5 (lima) lembar Rincian pendapatan bagi hasil;

39. 2 (dua) unit Mesin Pompa Tanah;

40. 2 (dua) unit Mesin gelondong tali rajuk;

41. 3 (tiga) batang pipa rajuk;

42. 2 (dua) selang Spiral;

43. 1 (satu) jangkar;

44. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan Ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Agus Riyadi Bin Gunawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nofriandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Maharani Cahyanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.  
M.H.

Junita Pancawati, S.H.,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofriandi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)